

***ECONOMIC COOPERATION FRAMEWORK AGREEMENT
(ECFA) SEBAGAI REALISASI KEBIJAKAN SATU CHINA***

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial
(S.Sos) dalam Bidang Hubungan Internasional**



**Oleh:
MUCHAMMAD SYAMSUL ARIF RAMADHAN
NIM I02215001**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
JULI 2019**

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : M Syamsul Arif R

NIM : I02215001

Pogram Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : *Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA)*


sebagai Realisasi Kebijakan Satu China

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 29 Juli 2019

Yang menyatakan


M Syamsul Arif R
NIM I02215001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : M Syamsul Arif R

NIM : I02215001

Program Studi : Hubungan Internasional

yang berjudul; ***“Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) sebagai Realisasi Kebijakan Satu China”*** saya berpendapat bahwa skripsi ini telah direvisi dan dapat diajukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 29 Juli 2019

Pembimbing



Muhammad Qobidl 'Ainul Arif, S.IP, MA
NIP 198408232015031002

PENGESAHAN

Skripsi oleh M Syamsul Arif R dengan judul "*Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) sebagai Realisasi Kebijakan Satu China*" telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 29 Juli 2019

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



M. Qobidl' Ainul Arif, S.IP, MA
NIP.198408232015031002

Penguji II



Ridha Amaliyah, S.IP, MBA
NUP.201409001

Penguji III



Abid Rohman, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 197706232007101006

Penguji IV



M. Fathoni Hakim, M.Si
NIP. 198401052011011008

Surabaya, 29 Juli 2019

Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dekan

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad. Dip. SEA, M.Phil, Ph.D.
NIP. 197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUCHAMMAD SYAMSUL ARIK RAMADHAN
NIM : 102215001
Fakultas/Jurusan : FISIP / HUBUNGAN INTERNASIONAL
E-mail address : msyamsularif@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ECONOMIC COOPERATION FRAMEWORK AGREEMENT
(ECFA) SEBAGAI REALISASI KEBIJAKAN SATU
CHINA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Agustus 2016

Penulis



(M. Syamsul Arif R)
nama terang dan tanda tangan

Taiwan menjadi wilayah yang patut diperhitungkan dalam hal kemajuan ekonomi dan aktivitas perdagangannya di dunia internasional. Taiwan menjadi mitra ekspor impor bagi produk elektronik dan kawasan industri alat berat di wilayah Asia. Taiwan berhasil menunjukkan citra diri sebagai wilayah yang mandiri dalam hal mengatur kebutuhan nasionalnya. Bagi Taiwan, Tiongkok menjadi mitra dagang sekaligus salah satu negara utama tujuan ekspor produk. Produk utama ekspor Taiwan yakni elektronik, Tiongkok menerima 42% produk Taiwan dari seluruh total negara tujuan ekspor Taiwan.⁴ Tiongkok dan Taiwan membentuk sebuah ketergantungan ekonomi dengan banyak melakukan aktivitas perdagangan dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu tahun 1987 hingga tahun 1997, angka pertukaran barang ekspor dan impor antara Tiongkok dan Taiwan naik dari 2% menjadi 18.36%.⁵ Diwaktu yang sama keduanya mengalami surplus dalam aktivitas perdagangan mereka. Dengan angka yang cukup besar ini, Taiwan dan Tiongkok membangun sebuah kerangka hubungan dagang yang cukup intensif dan terarah. Hubungan ekonomi ini mengalami kemajuan dari masa ke masa hingga terbentuk sebuah hubungan bernama hubungan lintas selat antara keduanya. Pada tahun 2010, Tiongkok dan Taiwan membentuk sebuah kerangka kerjasama yang mengatur hubungan dagang keduanya yang disebut ECFA. ECFA (*Economic Cooperation Framework Agreement*) adalah kerangka kerjasama

⁴ "Trading Economics." Taiwan Exports. diakses pada 2 Oktober 2018 pukul 12:15, <http://www.tradingeconomics.com/taiwan/exports>.

⁵ "Directorate General of Customs." Ministry of Finance. Taiwan. diakses pada 2 Oktober 2018 pukul 12:18, <https://cus93.trade.gov.tw/FSCE010F/FSCE010F>.

perdagangan dan investasi ke Tiongkok. Peningkatan volume perdagangan dan investasi antara Taiwan dan Tiongkok berimplikasi pada kemunculan ketergantungan Taiwan terhadap Tiongkok yakni apabila memutuskan hubungan dengan Tiongkok, Taiwan akan mengalami defisit perekonomian yang sangat tinggi dikarenakan ekspor Taiwan dari 9,1% dapat meningkat menjadi 23% setelah menjalin kerjasama ekonomi secara intensif dengan Tiongkok.⁷

Dengan adanya pemaparan diatas yang menurut peneliti telah memiliki dugaan adanya tujuan dan upaya pemerintah Tiongkok melalui ECFA dalam merealisasikan Kebijakan Satu China (*One China Policy*) karena peneliti belum menemukan statement resmi dari pemerintah Tiongkok tentang ECFA sehingga perlu adanya penelitian, peneliti akan berfokus untuk meneliti apakah ECFA (*Economic Cooperation Framework Agreement*) memiliki tujuan yang sama dengan Kebijakan Satu China (*One China Policy*) dan bagaimana upaya pemerintah Tiongkok merealisasikan ECFA (*Economic Cooperation Framework Agreement*).

B. RUMUSAN MASALAH

Dengan bertitik tolak pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah:

⁷ Kuo, Yu Hsin. "Towards One Taiwan One China: Discard Outdated One China Policy." *International Committee for Human Rights in Taiwan* (1996):14-15, diakses pada 3 Oktober 2018 pukul 14:23, doi:1027-39999.

1. Penelitian dengan judul 'Kepentingan Politik Luar Negeri China di Wilayah Taiwan Melalui *Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA)* tahun 2010'. Penelitian ini ditulis tahun 2013 oleh Briansyah Sujarwo, seorang mahasiswa hubungan internasional di Universitas Brawijaya, Malang. Penelitian ini menjelaskan tentang mengapa Tiongkok pada akhirnya menyetujui *Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA)* dengan Taiwan. Dalam hasil penelitiannya, peneliti mengetahui dan memberikan penjabaran yakni, dengan menyetujui ECFA, berarti Tiongkok berupaya untuk menyetujui langkah Amerika Serikat didalam kesepakatan yang menginginkan penciptaan dan penentuan kondisi masa depan lintas selat secara damai. Bukan tanpa alasan, kenapa Tiongkok berusaha untuk menyamakan persepsinya dengan Amerika Serikat dalam menyikapi isu lintas selat. Hal tersebut dikarenakan Tiongkok menginginkan sebuah imbalan ketika negara tersebut menjalankan kepentingan politik luar negerinya agar seirama dengan apa yang Amerika Serikat inginkan di wilayah Taiwan. Imbalan berupa kemudahan bagi Tiongkok untuk semakin dapat mendekatkan dirinya ke wilayah Taiwan tanpa harus mendapatkan respon negatif dari kompatriot Taiwan, yaitu struktur ikhtisar ekonomi Amerika Serikat

dan hubungan perdagangan Taiwan yang telah mendukung globalisasi ekonomi.⁸

Kesamaan penelitian yang dilakukan antara peneliti dan juga penelitian yang dilakukan oleh Briansyah Sujarwo adalah serupa membahas mengenai ECFA sebagai pembawa kepentingan politik luar negeri Tiongkok di wilayah Taiwan. Adapun perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah peneliti akan mengkaji lebih dalam ECFA sebagai pembawa kepentingan politik luar negeri Tiongkok yang lebih dispesifikasikan yakni Kebijakan Satu China (*One China Policy*) dengan Taiwan.

2. Penelitian dengan judul ‘Analisis Ketergantungan Ekonomi Taiwan – China terhadap Prospek Reunifikasi dalam *One China Policy*’. Penelitian ini ditulis tahun 2014 oleh Ayu Rahmadani, mahasiswa hubungan internasional di Universitas Airlangga, Surabaya. Penelitian ini menjelaskan bagaimana ketergantungan ekonomi antara Taiwan dan Tiongkok dapat berdampak positif terhadap prospek keberhasilan *One China Policy* yang ditandai dengan semakin meningkatnya peluang reunifikasi antara keduanya. Dalam hasil penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa ketergantungan ekonomi Taiwan

⁸ Briansyah, Sujarwo. “Kepentingan Politik Luar Negeri China di Wilayah Taiwan Melalui Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) tahun 2010.”(Skripsi S.Hub.Int, Universitas Brawijaya, 2013).

terhadap Tiongkok, kemudian dapat digunakan sebagai instrumen pemaksaan untuk mencapai kepentingan politik Tiongkok terkait unifikasi. Kekhawatiran ini setidaknya dapat dilihat dari dua pertimbangan, pertama, dalam perdagangan ekspor impor Taiwan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap Tiongkok. Kedua, mengenai *Foreign Direct Investments* (FDI) yang bersifat permanen daripada ketergantungan perdagangan ekspor-impor. Berbeda dengan interaksi dagang dimana kedua negara saling bertukar barang produksi, dalam investasi fisik jangka panjang atau FDI perusahaan akan terjebak di *host country*.⁹

Kesamaan penelitian yang dilakukan antara peneliti dan juga penelitian yang dilakukan oleh Ayu Rahmadani adalah serupa membahas mengenai ketergantungan Taiwan kepada Tiongkok dalam hal ekonomi sebagai prospek reunifikasi Kebijakan Satu China (*One China Policy*). Adapun perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah peneliti akan mengkaji lebih dalam ketergantungan ekonomi Taiwan dengan Tiongkok melalui salah satu perjanjian yang lebih spesifik yakni ECFA yang memiliki prospek reunifikasi Kebijakan Satu China (*One China Policy*).

⁹ Ayu, Rahmadhani. "Analisis Ketergantungan Ekonomi Taiwan – Cina terhadap Prospek Reunifikasi dalam One China Policy." (Skripsi S.Hub.Int, Universitas Airlangga, 2014).

3. Penelitian yang berjudul '*President Ma Ying-Jeou's Strategies to Promote ECFA in Taiwan*'. Penelitian ini ditulis pada tahun 2012 oleh Sun Shao Cheng, seorang politisi Tiongkok, *European Research Center on Contemporary Taiwan*, Tuebingen, Jerman. Penelitian ini menjelaskan strategi Presiden Taiwan Ma Ying Jeou untuk mempromosikan ECFA di Taiwan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pada tahap awal peningkatan kesadaran, Presiden Ma Ying Jeou menekankan bahwa jika Taiwan gagal menandatangani *Free Trade Area* (FTA) dengan perdagangan mitra, ekonomi Taiwan dan mata pencaharian masyarakat akan sangat menderita. Itu dibuktikan ketika seorang pemimpin meramalkan potensi krisis, seorang pemimpin tersebut akan memprioritaskan agenda perhatian publik untuk mendapatkan dukungan dari orang-orang dan membuka jalan bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang dibutuhkan. Pada tahap pembentukan kelompok kerja, Presiden Ma Ying Jeou mendaftarkan anggota kelompok kerja dari pemerintahannya yakni organisasi yang relevan berdasarkan pada area tanggung jawab mereka sendiri kemudian dapat menciptakan strategi yang layak untuk merealisasikan ECFA. Pada tahap menciptakan strategi, pemerintah secara aktif mempromosikan sisi baik dari perjanjian tersebut dan menggarisbawahi hak-hak orang yang akan dilindungi. Pada tahap implementasi, pemerintahan Ma Ying Jeou telah menerapkan

kebijakan peningkatan berkomunikasi dengan orang-orang dan berusaha mendapatkan dukungan dari masyarakat. Di akhir penelitian ini menunjukkan bahwa teori kolaborasi strategis dapat diterapkan dalam strategi Presiden Ma Ying Jeou untuk mempromosikan ECFA di Taiwan. Usulan perbaikan dan menampilkan keburukan di kerjasama *E-Commerce* lintas selat dan juga menunjukkan kerjasama lintas selat dalam industri *E-Commerce* harus bergantung pada kerja sama dalam kebijakan dan kepemimpinan dari kedua sisi pemerintahan. Kerjasama industri *E-Commerce* bergantung pada kebijakan yang mapan dan peraturan yang dibuat oleh kedua pemerintah, dan oleh karena itu *E-commerce* di masa yang akan datang dapat menciptakan lebih banyak minat untuk kedua belah pihak.¹⁰

Kesamaan penelitian yang dilakukan antara peneliti dan juga penelitian yang dilakukan oleh Sun Shao Cheng adalah serupa membahas mengenai ECFA sebagai upaya Tiongkok untuk menjadikan satu China. Adapun perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah peneliti akan mengkaji upaya pemerintah Tiongkok melalui ECFA untuk menjadikan Taiwan sebagai sebagian dari Tiongkok.

¹⁰ Sun, Shao Cheng. "President Ma Ying-Jeou's Strategies to Promote ECFA in Taiwan." European Research Center on Contemporary Taiwan. 2012. diakses pada 8 Oktober 2019 pukul 13:28, <http://www.ercct.uni-tuebingen.de>

G. DEFINISI KONSEPTUAL

1. ECFA (*Economic Cooperation Framework Agreement*)

ECFA (*Economic Cooperation Framework Agreement*) adalah perjanjian perdagangan preferensial antara pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dan Taiwan yang bertujuan untuk mengurangi tarif komersial yang dianggap menjadi penghalang antara kedua belah pihak. Pada 29 Juni 2010 ECFA ditandatangani, di Chongqing. Tujuan utama ECFA adalah mempromosikan normalisasi hubungan dagang ekonomi lintas selat, melihat maraknya pembatasan dalam perdagangan dan perdagangan lintas selat. Yang kedua adalah menghindari Taiwan terpinggirkan oleh integrasi ekonomi regional. Mengingat penandatanganan integrasi ekonomi regional akan memberikan pengecualian tarif secara timbal balik, maka gagalnya penandatanganan perjanjian perdagangan bebas dengan kunci perdagangan mitra menempatkan Taiwan pada risiko terpinggirkan dan kehilangan daya saing di pasar internasional. Taiwan menandatangani perjanjian dengan Tiongkok sebagai pasar ekspor utama, yang diharapkan membantu tingkat partisipasi dalam integrasi ekonomi regional dan mengurangi risiko marginalisasi ekonomi. Tujuan utama selanjutnya adalah untuk meningkatkan posisi Taiwan sebagai platform untuk investasi regional. Penandatanganan perjanjian perdagangan dengan Tiongkok diharapkan menawarkan insentif bagi perusahaan transnasional untuk menggunakan Taiwan sebagai batu loncatan perdagangan dan

keamanan pangan, mekanisme untuk penyelesaian sengketa, badan eksekutif, amandemen, tanggal mulai berlaku, klausa pengakhiran, dan seterusnya.¹²

Sifat dari ECFA adalah tidak mengikuti model perjanjian yang ditandatangani oleh Tiongkok dengan Hong Kong dan Macau. Dalam negosiasi ECFA disesuaikan dengan prinsip-prinsip *World Trade Organization* (WTO) dan mempertimbangkan sepenuhnya karakteristik yang berbeda dari hubungan lintas selat. Seperti perjanjian lain yang disepakati antara kedua belah pihak, hanya ECFA yang berurusan dengan kerjasama ekonomi lintas selat dan tidak menyentuh tentang kedaulatan atau masalah politik. Panduan prinsip-prinsip dalam negosiasi ECFA yakni negosiasi dilakukan atas dasar kesetaraan, martabat dan keadilan, dan tidak membahayakan status Taiwan. Selanjutnya, sesuai dengan komitmen yang dinyatakan Presiden Taiwan, pemerintah tidak akan membuka pasar Taiwan lebih jauh ke arah hasil pertanian dari Tiongkok, juga tidak akan memungkinkan pekerja Tiongkok beralih ke Taiwan. Prinsip panduannya adalah kebutuhan nasional milik Taiwan serta dukungan publik dan pengawasan legislatif.¹³

2. Kebijakan Satu China (*One China Policy*)

Wilayah Tiongkok yang begitu luas dengan berbagai macam etnis menjadikan Tiongkok selalu waspada terhadap bentuk-bentuk disintegrasi. Dalam rangka mengurangi kemungkinan disintegrasi kawasan maka pemerintah

¹² “Mainland Affairs Council Republic of China.” Taiwan. diakses pada 9 Oktober 2018 pukul 11:00 <http://www.mac.gov.tw/public/data/051116322071.pdf>

¹³ Ibid.,

Tiongkok memberlakukan wilayah otonomi. Wilayah-wilayah yang termasuk dalam wilayah otonomi Tiongkok adalah Tibet, Guangxi, Inner Mongolia, Ningxia dan Xinjiang. Wilayah otonom ada sebagai bentuk kompromi antara Tiongkok dengan wilayah-wilayah yang lebih memilih independen secara total dan memiliki etnis besar non Han atau populasi etnis minoritas.¹⁴

Dalam level administratif, wilayah otonom memiliki pemerintah lokal sendiri dan lebih memiliki kekuasaan untuk mengatur legislasinya. Akan tetapi, kecemburuan sosial terhadap perhatian pemerintah Tiongkok masih muncul meskipun wilayah-wilayah tersebut telah mendapati posisi sebagai wilayah otonom. Secara fakta, wilayah-wilayah yang mendapat predikat otonomi tersebut pada beberapa kondisi, kurang memiliki otonomi dalam mengatur legislasinya dibandingkan dengan provinsi seperti Beijing, Tianjin, Shanghai dan Chongqing. Wilayah-wilayah terluar Tiongkok semakin menghendaki independennya. Maka, untuk mengintegrasikan wilayah-wilayah tersebut, Tiongkok kemudian membuat kebijakan yang dinamakan *One China Policy*. Penerapan kebijakan ini tidaklah mudah dikarenakan ketidaksepakatan suatu wilayah terhadap pelaksanaan kebijakan. Satu wilayah yang hingga saat ini belum ada kepastian apakah

¹⁴ Berglee, Royal. "East Asia in Regional Geography of The World: Globalization, People and Places." University of Minnesota Libraries Publishing (2016). diakses pada 10 Oktober pukul 15:18, <http://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/>

country. Pencarian informasi tersebut berupa pemberian laporan tentang kesempatan bisnis, pengembangan dan kebutuhan perusahaan, informasi terkait peraturan bisnis dan sebagainya.²⁸

Networking and Public Relations. Membangun jaringan bisnis merupakan kebutuhan adanya mitra bisnis yang bertujuan mengembangkan bisnis. Membangun hubungan masyarakat adalah strategi yang penting bagi promosi investasi, meliputi mengembangkan relasi bisnis dengan perusahaan dan menghadiri forum bisnis di *home* atau *host country*. *Contract Negotiator of Implementation*. Negosiasi bisnis terhadap pemerintah atau perusahaan dari *host country*. Hal ini sangat penting dalam diplomasi komersial yang menyangkut hubungan pebisnis dan pemerintah antara *host country* dengan *home country*. *Problem solving*. Penyelesaian masalah dalam bisnis sangat dibutuhkan yang terkait dengan peraturan di *host country* yang dapat merugikan pebisnis dalam negeri, dan permasalahan lain yang berhubungan laju aktivitas bisnis.²⁹

Daya tarik FDI yakni kegiatan yang berkembang karena mereka merangsang pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja di sektor prioritas atau daerah, serta melengkapi kerja sama dalam pengetahuan dan teknologi. Aktivitas

²⁸ Larissa, Moss. "Business Intelligence Roadmap: The Complete Project Lifecycle for Decision-Support Applications." Addison Wesley Professional (2003). diakses pada 23 Maret 2019 pukul 14:21, <https://trove.nla.gov.au/work/16488348?selectedversion=NBD24090247>

²⁹ Rizki Rahmadini. "Peran Diplomasi Komersial Dalam Pengembangan Industri Smelter Bauksit di Indonesia. Thesis. (Universitas Gajah Mada, 2015)

pihak swasta yang didukung oleh negara untuk melakukan ekspansi perdagangan di negara-negara mitranya. Ketiga, seperti halnya diplomasi tradisional, diplomasi komersial merupakan alat negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, oleh karena itu negara menjadi aktor utama dalam diplomasi komersial. Meskipun berperan sebagai aktor utama, negara bukanlah pemain tunggal. Peran non negara seperti, pelaku bisnis individu, hadirnya konsumen atau masyarakat, dan sistem perdagangan internasional juga memiliki peran dalam menentukan keberhasilan diplomasi komersial sebuah negara.³³ Berdasarkan pemaparan diatas, diplomasi komersial merupakan pendekatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain, dengan melibatkan peran pebisnis yang diberi fasilitas seperti kerjasama dan perjanjian dagang oleh pemerintah.

H. ARGUMENTASI UTAMA

Setelah membaca dan melihat fakta-fakta yang ada mengenai peran ECFA sebagai salah satu bentuk realisasi *One China Policy*, mulai dari sejarah awalnya perseteruan antara Tiongkok dan Taiwan, hingga menjadikan terjadinya penandatanganan ECFA sebagai pertemuan kearah perdamaian secara ekonomi antara Tiongkok dan Taiwan. Berdasarkan konsep diplomasi komersial yang menjadikan pebisnis sebagai salah satu aspek dalam diplomasi yang dilakukan pemerintah, ketergantungan ekonomi ini menjadi peluang bagi Tiongkok untuk

³³ "The Institute for Trade and Commercial Diplomacy." diakses pada 18 Oktober 2018 pukul 20:03 <https://www.commercialdiplomacy.com/>

berada.³⁴ Dari penjelasan tersebut yang menjadi unit analisis adalah pemerintah Tiongkok dengan level analisisnya pada tingkat negara.

3. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan penelitian mengenai upaya pemerintah Tiongkok merealisasikan ECFA di dalamnya menggunakan tahapan berfikir, pertama bahwa rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian akan dicarikan jawaban sementara melalui situs-situs resmi yang terkait dengan Kebijakan Satu China (*One China Policy*) dan ECFA. Kedua, jawaban akan rumusan masalah yang belum dapat dipecahkan melalui telaah situs-situs resmi kedua negara baik Tiongkok maupun Taiwan. Ketiga, data yang didapatkan akan melewati tahap analisis data versi Miles dan Huberman yakni, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.³⁵ Keempat, setelah melalui analisis data, tahap selanjutnya yakni menyusun laporan hasil penelitian, menyusun laporan penelitian atas dasar saran dan bimbingan oleh dosen pembimbing dan ujian pertanggung jawaban laporan hasil penelitian kepada dosen penguji.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui dokumentasi. Dokumentasi adalah pengambilan data yang diproses melalui dokumen-dokumen.

³⁴ Mochtar Mas' oed. "*Disiplin Ilmu dan Metodologi*". (Yogyakarta: Pusat antar Universitas Studi Sosial Universitas Gadjah Mada LP3E, 2008)

³⁵ Sugiyono. "*Memahami penelitian Kualitatif*". Bandung. ALFABETA. 2010

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data yang berupa dokumen atau arsip. Data yang diperoleh berupa tulisan, rekaman seperti buku-buku pedoman, naskah ECFA, jurnal, surat kabar, website, laporan resmi, catatan harian, dan sumber lainnya.³⁶ Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi dilakukan dengan cara melalui studi pustaka dengan melihat data-data yang relevan dengan judul yang diangkat oleh peneliti.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil studi pustaka. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar.³⁷

Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman, yaitu sebagai berikut.³⁸

³⁶ Arikunto, S. "*Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal.*" Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2002.

³⁷ Moleong, Lexy. J. "*Metodologi Penelitian Kualitatif.*" Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2011.

³⁸ Sugiyono. "*Memahami penelitian Kualitatif.*" Bandung. ALFABETA. 2010

- a. Pengumpulan Data. Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.
- b. Reduksi Data. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, menelusur tema, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.
- c. Penyajian Data. Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan tindakan.
- d. Penarikan Kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.

6. Keabsahan Data

Data yang dinyatakan valid dalam penelitian kualitatif adalah apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada

obyek yang diteliti. Pengujian keabsahan data menggunakan empat kriteria sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono, yaitu:³⁹

- a. Kepercayaan (*credibility*). Uji *credibility* atau validitas internal merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif yang dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*.
- b. Keteralihan (*transferability*). *Transferability* merupakan validitas eksternal pada penelitian kualitatif. *Transferability* perlu dilakukan orang lain yang telah mempelajari laporan peneliti. Orang lain, termasuk rekan-rekan peneliti, para pembimbing atau promotor, dan para penguji akan membandingkannya dengan kepustakaan, wacana, penelitian, dan pengalaman masing-masing. Agar mereka itu memperoleh gambaran yang jelas, peneliti perlu menjelaskan latar dan adegan mengenai lapangan tempat gejala itu berlangsung dan peneliti teliti.
- c. Kebergantungan (*dependability*). *Dependability* dalam penelitian kualitatif disebut reliabilitas. Suatu penelitian dikatakan *dependability* apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh

³⁹ Sugiyono. "Memahami penelitian Kualitatif." Bandung. ALFABETA. 2010

variabel yang terdapat dalam judul penelitian dan juga menjelaskan konsep yang akan digunakan dalam penelitian deskriptif di penelitian ini. Selanjutnya, peneliti menjelaskan argumentasi utama sebagai asumsi sementara. Setelahnya, peneliti menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan, diantaranya adalah pendekatan dan jenis penelitian, unit dan tingkat analisis, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, keabsahan data, hingga sistem penulisan skripsi.

Pada bab 2 peneliti membahas fakta – fakta tentang kebenaran apakah ECFA merupakan bagian dari realisasi Kebijakan Satu China (*One China Policy*). Dalam bab ini, peneliti menjelaskan dari segi sejarah, visi dan misi, dan implementasi dari Kebijakan Satu China (*One China Policy*) maupun ECFA. Setelah itu, peneliti membuat tabel hubungan antara Kebijakan Satu China (*One China Policy*) dan ECFA sebagai pembuktian bahwa terdapat hubungan segaris antara keduanya.

Pada bab 3 peneliti membahas tentang upaya pemerintah Tiongkok merealisasikan ECFA. Dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan, bahwa terdapat empat kategori yang sesuai dengan konsep diplomasi komersial Evan Potter tentang upaya pemerintah Tiongkok dalam merealisasikan ECFA, yakni *intelligence, networking and public relations, contract negotiator of implementation* dan *problem solving*.

BAB II

ECFA DAN KEBIJAKAN SATU CHINA

A. Sejarah Kebijakan Satu China (*One China Policy*)

Pada tahun 1887, Tiongkok dikuasai oleh orang-orang nasionalis yang dipimpin oleh Chiang Kai Shek. Namun tahun 1927, terjadi perang saudara di Tiongkok ketika masuknya dan keinginan orang-orang komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong menguasai Tiongkok. Hingga akhirnya kekalahan oleh orang-orang sosialis yang mengasingkan diri pergi ke pulau Formosa untuk membangun negara sendiri yang bernama Taiwan.⁴⁰

Perginya orang-orang sosialis ke Taiwan membuat kondisi perpolitikan dan hubungan diplomatik diantara Tiongkok dan Taiwan terus mengalami pergolakan. Sejak berpisah dari Tiongkok, Taiwan hingga saat ini diakui sebagai suatu negara hanya oleh beberapa negara saja bahkan PBB hanya mengakuinya sebagai provinsi dari negara Tiongkok. Pemerintah Tiongkok mengeluarkan kebijakan yang dinamakan Kebijakan Satu China (*One China Policy*) yang isinya menunjukkan bahwa hanya ada satu China yang berdaulat. Jadi, keberadaan Taiwan merupakan bagian dari Tiongkok dan tidak dianggap sebagai negara yang terbentuk karena dirinya sendiri di luar Tiongkok. Pemerintah Tiongkok juga

⁴⁰ Winoardi, Grace Lestariana, "Menelisik Kedaulatan Taiwan," Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2013), diakses pada 23 Februari 2019 pukul 06:28, <http://hi.umy.ac.id/menelisik-kedaulatan-taiwan/>

mengakui atas wilayah seperti Hongkong, Macau dan Taiwan sebagai negara yang terintegrasi dengan Tiongkok. Sehingga hubungan kerjasama atau diplomatik dengan China harus melalui satu pemerintahan saja dan hal ini harus setidaknya disetujui oleh negara yang ingin menjalin kerjasama dengan China.⁴¹

Kebijakan Satu China telah berkembang dalam perjalanan perjuangan rakyat Tiongkok untuk melindungi kedaulatan Tiongkok dan integritas wilayah, baik secara *de facto* dan *de jure*. Taiwan adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Tiongkok. Semua fakta dan hukum tentang Taiwan membuktikan bahwa Taiwan merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah Tiongkok. Pada hari pendiriannya, Pemerintah Pusat Rakyat Tiongkok menyatakan kepada pemerintah dari seluruh negara di dunia, bahwa pemerintahan pusat rakyat Tiongkok adalah pemerintahan yang sah satu-satunya yang mewakili seluruh rakyat Republik Rakyat China. Kebijakan Satu China artinya hanya ada satu China, dan Taiwan merupakan bagian dari Tiongkok. Masing-masing bersikeras melakukan legitimasi pemerintah mereka masing-masing. Dengan adanya kebijakan ini, berarti bahwa negara-negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok harus memutuskan hubungan resmi dengan Republik Taiwan.⁴²

⁴¹ "American Institute in Taiwan," diakses pada 23 Februari 2019 pukul 08:39, https://www.ait.org.tw/eb/about_it/tra/

⁴² "The One-China Principle and the Taiwan Issue," diakses pada 23 Februari 2019 pukul 08:49, <http://www.china.org.cn/english/taiwan/7956.htm>

Secara garis besar, kebijakan tersebut dapat ditelusuri kembali ke tahun 1949 dan berakhirnya perang saudara China. Para sosioalis yang kalah, juga dikenal sebagai Kuomintang mundur ke Taiwan, sementara itu Komunis yang menang lalu mendeklarasikan Republik Rakyat Tiongkok menjadikan wilayah China daratan sebagai milik pusat pemerintahan sementara. Kedua belah pihak mengatakan mereka mewakili seluruh China. Awalnya, banyak pemerintah termasuk Amerika Serikat mengakui Taiwan saat mereka menghindar dari China Komunis. Tetapi angin diplomatik bergeser ketika Tiongkok dan Amerika Serikat melihat kebutuhan bersama untuk berkembang hubungan dimulai pada tahun 1970, dengan terjadinya beberapa negara memutuskan hubungan dengan Taipei untuk Beijing. Namun banyak yang masih mempertahankan hubungan informal dengan Taiwan melalui kantor perdagangan atau budaya lembaga, dan Amerika Serikat tetap menjadi sekutu di bidang keamanan paling penting Taiwan.

B. Visi dan Misi Kebijakan Satu China (*One China Policy*)

Kebijakan Satu China merupakan salah satu dari beberapa unsur utama dari perselisihan antara Taiwan dan Tiongkok yang telah disepakati secara resmi. Kebijakan diabadikan dalam konstitusi Taiwan, dan prinsip yang dipilih oleh presiden terpilih Taiwan, Chen Shui Bian, menyatakan presiden siap untuk membicarakan dengan Tiongkok. Yang paling penting adalah kebijakan yang telah menjaga stabilitas di Selat Taiwan, memungkinkan Taiwan dan Tiongkok untuk mengejar transisi politik dan sosial ekonomi mereka yang luar biasa selama dua

D. Sejarah ECFA

Kondisi Taiwan yang mengabaikan kemungkinan untuk pengasingan politik, terutama hubungan yang sering tidak nyaman dengan Tiongkok yang memainkan peran utama dalam menghambat upaya Taiwan untuk berpartisipasi dalam integrasi regional. Dengan demikian, penolakan pengakuan terhadap Taiwan telah membuat Taipei berada dalam posisi rentan dalam hal kompetisi untuk menetapkan FTA dalam wilayah Asia Pasifik, dengan kebangkitan ekonomi dan politiknya sejak 1990an, Tiongkok tetap menjadi jantung integrasi di Asia.⁴⁵

Secara politis, Taipei dan Beijing sepakat untuk menyesuaikan diri dengan gagasan ambigu tentang *Consensus 92*, yakni pada tahun 1992 sebuah kesepakatan tercapai antara Taiwan dan Tiongkok, *Koo Wang Summit* antara ketua *Straits Exchange Foundation* Koo Chen Fu dan ketua *Association for Relations Across the Taiwan Straits* Wang Daohan.⁴⁶ Pada pertemuan itu, kedua belah pihak setuju untuk mengakui fakta, bahwa hanya ada satu China di dunia, tetapi belum meninggalkan ruang untuk interpretasi terhadap perwakilan resmi dari negara Tiongkok. Kesepakatan untuk tidak setuju sejalan dengan kebijakan baru Taipei yang mengesampingkan perbedaan politik, dan pada gilirannya memimpin untuk penyelesaian tiga hubungan yakni, hubungan pos, transportasi, dan perdagangan

⁴⁵ China Aktuel, "Cross-Strait Relations and Regional Integration: A Review of the Ma Ying-jeou Era (2008–2016)," *Journal of Current Chinese Affairs* (2017):13-14, diakses pada 24 Februari 2019 pukul 07:21, ISSN:1868-4874

⁴⁶ Xinhuanet.com, "Mainland, Taiwan organizations hold first talks in 9 years, diakses pada 6 Maret 2019 pukul 23:15, <http://www.xinhuanet.com/mainland-taiwan-organizations-hold/>

dan kerja sama fungsional seluruh Selat di bidang pariwisata, pendidikan, memerangi kriminalitas, dan keamanan pangan.⁴⁷

Menyusul pergantian partai yang berkuasa pada tahun 2008, yakni Kuomintang, pemerintah Taiwan berusaha untuk memperbaiki catatan buruk di integrasi regional dengan mencari rekonsiliasi politik dengan Tiongkok dan mengakhiri kompetisi diplomatik di Selat Taiwan. Memulai dengan menyerukan gencatan diplomatik dan menerapkan diplomasi fleksibel. Presiden Taiwan, memiliki harapan yakni meningkatkan hubungan luar negeri, dan hubungan ekonomi, dengan mengesampingkan perbedaan politik dengan Beijing untuk fokus pada potensi fungsional yakni kerja sama lintas Selat. Pada tahun 2009, presiden Taiwan menyimpulkan aspirasi diplomatik dalam frasa 16 karakter yang mendorong Taiwan dan Tiongkok untuk menghadapi kenyataan, membangun rasa saling percaya, menetapkan mengesampingkan perselisihan, dan bersama-sama membangun *win-win solution*.⁴⁸

Niat baik diungkapkan oleh Taipei di bawah pemerintahan Ma Ying Jeou hingga akhirnya didengar oleh Beijing sehingga membangun fondasi untuk meningkatkan interaksi dan kerja sama antara Taiwan dan Tiongkok. Pada tahun 2010, dalam hal pertukaran ekonomi, setelah lima putaran pertemuan antara ketua

⁴⁷ China Aktuel, "Cross-Strait Relations and Regional Integration: A Review of the Ma Ying-jeou Era (2008–2016)," *Journal of Current Chinese Affairs* (2017):13-14, diakses pada 24 Februari 2019 pukul 08:42, ISSN:1868-4874

⁴⁸ Lee Cheng Yu, "Liangyan guanxi de fazhan yu kunjing," *The Development of Cross-Strait Relations and Its Dilemma* (2010), diakses pada 24 Februari 2019 pukul 08:23, <https://core.ac.uk/download/pdf/143832144.pdf>

Taiwan bersaing dengan perusahaan dari sejumlah negara ASEAN di pasar China, perusahaan-perusahaan Taiwan merasa cemas tentang posisi mengenai akses pasar. Oleh karena itu, Taiwan menyimpulkan ECFA dengan Tiongkok untuk mengatasi kelemahan ini di pasar China.⁵¹

ECFA yakni sebuah perjanjian yang paling penting antara kedua rival politik sejak terjadinya perang saudara China pada akhir tahun 1949. ECFA dimaksudkan untuk membentuk integrasi ekonomi lintas Selat Taiwan dengan perjanjian kerangka kerja. ECFA tidak hanya berfungsi sebagai kesepakatan perdagangan bilateral pertama antara Tiongkok dan Taiwan dengan puluhan tahun perselisihan kedaulatan di dunia Internasional, tetapi juga suatu perjanjian kerangka kerja yang melambangkan bahwa Taiwan mengakui perlunya membangun sebuah platform kerja sama yang dilembagakan dengan mitra dagang terbesarnya yakni Tiongkok, dan sebagai upaya anti marginalisasi dalam integrasi regional Asia Timur yang dimulai oleh pembentukan FTA ASEAN.

⁵¹ Chen, Shin-Horng, Meng-Chun Liu, and Pei-Chang Wen. "The ECFA and Its Effect on Cross-strait Trade and Investment: A Taiwanese Perspective." *China Economic Journal* 4 (2011): 105-24, diakses pada 24 Februari 2019 pukul 09:48, doi:10.1080/17538963.2011.666060

E. Visi dan Misi ECFA

Berikut akan dipaparkan visi misi ECFA sesuai yang peneliti dapatkan data dari website resmi pemerintah Taiwan :⁵²

- a) Untuk mempromosikan normalisasi ekonomi lintas-selat dan hubungan dagang. Meskipun kedua sisi Selat Taiwan saat ini adalah anggota WTO, banyak pembatasan dalam perdagangan lintas-selat dan perdagangan tetap;
- b) Untuk menghindari Taiwan yang terpinggirkan oleh integrasi ekonomi regional integrase. Mengingat bahwa penandatanganan memberikan pengecualian tarif secara timbal balik, gagal menandatangani FTA dengan perdagangan utama mitra menempatkan Taiwan pada risiko terpinggirkan dan kehilangan daya saing di pasar utama. Menandatangani perjanjian dengan daratan Tiongkok, pasar ekspor utama Taiwan, akan membantu partisipasi dalam integrasi ekonomi regional dan mengurangi risiko marjinalisasi ekonomi;
- c) Untuk meningkatkan posisi Taiwan sebagai platform untuk investasi regional. Menandatangani perjanjian perdagangan dengan Tiongkok daratan akan menawarkan insentif bagi perusahaan transnasional Taiwan untuk batu loncatan perdagangan dan investasi ke pasar Asia Timur, yang akan membantu Taiwan untuk berintegrasi dengan lebih baik ke dalam perdagangan sistem global.

F. Implementasi ECFA

Untuk memahami implementasi ECFA lebih lanjut, peneliti akan memaparkan *timeline* implementasi ECFA dari tahun 2010 – 2015, dapat dilihat pada gambar 3 berikut:

⁵² Taiwan.gov.tw. “*Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) Background,*” diakses pada 24 Februari 2019 pukul 10:33, <http://www.mac.gov.tw/public/data/051116322071.pdf>

	dan politiknya di tingkat internasional.	antara Tiongkok dan Taiwan terus mengalami kekacauan.
Upaya Reunifikasi	<p>- Taiwan berharap untuk meningkatkan hubungan luar negerinya dan menyimpulkan aspirasi diplomatiknya dengan Tiongkok untuk menghadapi kenyataan, membangun rasa saling percaya, mengesampingkan perselisihan, dan bersama-sama membangun win-win solution.</p> <p>- ECFA melambangkan bahwa, Taiwan mengakui perlunya membangun sebuah platform kerja sama yang dilembagakan dengan Tiongkok.</p>	<p>- Tiongkok menyatakan kepada pemerintah dunia, Kebijakan Satu China artinya hanya ada satu China dan Taiwan merupakan bagian dari Tiongkok. Baik Tiongkok maupun Taiwan, keduanya telah lama menyepakati adanya kebijakan Satu China.</p> <p>- Kebijakan Satu China diabadikan dalam konstitusi Taiwan, Chen Shui Bian, menyatakan presiden siap membicarakan dengan Tiongkok.</p>
Tujuan Integrasi	ECFA merupakan sebuah perjanjian yang paling penting antara Tiongkok dan Taiwan sejak akhir tahun 1949 yakni perang saudara China. ECFA dimaksudkan untuk membentuk integrasi ekonomi lintas Selat Taiwan dengan perjanjian kerangka kerja.	Pemerintah Tiongkok juga mengakui atas wilayah seperti Hongkong, Macau, dan Taiwan sebagai negara yang terintegrasi dengan Tiongkok. Sehingga hubungan diplomatik apapun dengan China, harus melalui satu pemerintahan saja dan hal ini harus setidaknya disetujui oleh negara yang ingin menjalin kerjasama.
Visi Misi Ekonomi	ECFA merupakan salah satu upaya untuk mempromosikan normalisasi ekonomi Lintas Selat dan hubungan dagang antara Tiongkok dan Taiwan.	Kebijakan Satu China adalah kebijakan yang telah menjaga stabilitas di Selat Taiwan, yang memungkinkan Taiwan dan Tiongkok untuk mengejar transisi politik dan sosial ekonomi mereka yang luar biasa selama dua dekade terakhir dalam perdamaian relatif.
Visi Misi Ruang Internasional	Dalam ECFA, Tiongkok sebagai pasar ekspor utama Taiwan, akan membantu partisipasi dalam integrasi ekonomi regional dan mengurangi risiko marginalisasi ekonomi.	Kebijakan Satu China memperhitungkan keinginan Taipei akan ruang internasional dan klaim pemerintah tentang kedaulatan serta pulau yang didiami oleh Taiwan sekarang,

Satu China dan ECFA yakni karena adanya perpecahan yang melibatkan kekacauan politik dan ekonomi antara kedua negara. Dalam segi upaya reunifikasi, keinginan Tiongkok dalam Kebijakan Satu China menginginkan Taiwan kembali dan ECFA menginginkan keduanya bergabung untuk hubungan yang baik dalam segi politik maupun ekonomi. Dalam segi visi misi ekonomi, Kebijakan Satu China sebagai alat untuk menjaga stabilitas hubungan lintas Selat dalam politik maupun ekonomi, dan sama dengan ECFA sebagai alat untuk mempromosikan normalisasi ekonomi lintas Selat hubungan dagang antara kedua negara. Dalam segi visi misi ruang internasional, Kebijakan Satu China untuk memperhitungkan keinginan Taipei akan ruang internasional dan klaim pemerintah tentang kedaulatan serta pulau yang didiami oleh Taiwan sekarang, begitu pula dengan ECFA yang menjadikan Tiongkok sebagai pasar ekspor utama Taiwan, akan membantu partisipasi Taiwan dalam integrasi ekonomi regional dan mengurangi risiko marginalisasi ekonomi. Dari segi implementasi, sebagai wujud Kebijakan Satu China, pemerintah Tiongkok telah berusaha keras untuk menyatukan kembali China secara damai dengan mengadakan pertukaran ekonomi dan budaya serta kontak orang ke orang antara kedua sisi Selat Taiwan telah membuat kemajuan pesat sejak akhir 1987, sementara itu ECFA juga memiliki kesamaan dalam tujuan bersatunya Taiwan dan Tiongkok dengan penandatanganan pakta penting perdagangan bebas yang dipandang sebagai perjanjian paling signifikan dalam 60 tahun pemisahan. Dari persamaan pada tabel 1 diatas, terungkap fakta bahwa ECFA merupakan wujud nyata dari Kebijakan Satu China.

Taiwan di pasar Tiongkok, yang pada gilirannya akan sangat meningkatkan industri pertanian di Taiwan.

2. Elektronik & IT

Tiongkok diharapkan memberikan akses kemudahan bagi teknologi dari Taiwan untuk diimpor ke Tiongkok, yang mempertahankan pusat manufaktur dunia serta pasar terbesar dunia untuk produk-produk elektronik. Taiwan juga mengharapkan kemungkinan untuk memperbaiki rantai industri IT menjadi lebih komprehensif dan hemat biaya di wilayah Tiongkok yang lebih besar.

3. Logistik

Tiongkok diharapkan untuk mengurangi dan menghilangkan sebagian besar tarif untuk angkutan barang dari Taiwan. Di sisi lain, secara substansial menyederhanakan prosedur bea cukai dan memperpendek perkiraan waktu. Akibatnya, bisnis logistik yang memiliki teknologi hemat biaya akan mendapat manfaat paling banyak.

4. Infrastruktur

Sebagai pemanfaatan hubungan ekonomi yang lebih dekat dengan Taiwan, Tiongkok diharapkan untuk memperpanjang undangannya bagi pebisnis Taiwan untuk berinvestasi dalam infrastruktur di Tiongkok. Beberapa proyek

keutamaan dan pemerintah Taiwan ingin membantu pelaku bisnisnya mengembangkan industri di luar Taiwan.

B. *Networking and Public Relations*

Kegiatan *government objectives* yang kedua, sesuai dengan konsep diplomasi komersial Evan Potter, *networking and public relations* adalah kebutuhan adanya mitra bisnis dan membangun hubungan masyarakat yang merupakan strategi penting bagi promosi investasi, yang meliputi pengembangan relasi bisnis dengan perusahaan dan menghadiri forum bisnis di *home* atau *host country*. Hal ini berkenaan dengan upaya kedua negara agar terjalin suatu hubungan perdagangan yang lebih intensif. Dalam penelitian ini, strategi penting bagi promosi investasi yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok untuk menarik investor dari Taiwan, meliputi pengembangan relasi bisnis dan hadir dalam pertemuan forum bisnis di Tiongkok maupun di luar Tiongkok. Peneliti menemukan upaya pemerintah Tiongkok dalam merealisasikan ECFA sesuai dengan konsep diplomasi komersial Evan Potter yakni, seperti yang tercantum dalam ECFA pada Bagian 3, Pasal 6 yang berbunyi:⁵⁷

Kerjasama Ekonomi

1. Untuk meningkatkan dan memperluas manfaat dari Perjanjian ini, kedua Pihak telah sepakat untuk memperkuat kerja sama

⁵⁷ "Ministry of Economic Affairs Taiwan." diakses pada 29 Maret 2019 pukul 11:45.
http://www.moea.gov.tw/Mns/populace/news/News.aspx?kind=1&menu_id=40&news_id=19723

1. Pada Juni tahun 2013, Pemerintah provinsi Fujian, Tiongkok memperkuat hubungan dengan Taiwan dengan memberi Taiwan tiga panda merah dan memberikan bantuan kepada usaha kecil dan menengah Taiwan yang beroperasi di provinsi tersebut. *Pingtan Experimental Zone* di provinsi Fujian, Tiongkok akan berfungsi sebagai model pertukaran ekonomi lintas selat, bersumpah untuk membangunnya menjadi taman industri berbasis ilmu pengetahuan yang akan menarik investasi Taiwan.⁵⁸
2. Pada Oktober 2013, di lobi hotel pada sela pertemuan APEC Indonesia 2013 di pulau Bali, Indonesia, Wang Yu Chi, *China Mainland Affairs Council Minister*, berbicara singkat dengan Zhang Zhijun, *Office Minister of Taiwan Affairs*, masing-masing menyapa dengan gelar resminya. Keduanya menyerukan pembentukan mekanisme dialog reguler antara kedua lembaga mereka untuk memfasilitasi keterlibatan lintas selat. Zhang juga mengundang Wang untuk mengunjungi Tiongkok.⁵⁹

⁵⁸ Huang, Chi Kuan. "China unveils 31 measures to promote exchanges with Taiwan." Focus Taiwan News Channel. 2013. diakses pada 31/03/2019 pukul 21:16, <http://focustaiwan.tw/news/aall/201306160027.aspx>

⁵⁹ Jay, Chou. "Taiwan, Chinese ministers meet in groundbreaking first." Focus Taiwan News Channel. 2013, diakses pada 29 Maret 2019 pukul 12:23. <http://focustaiwan.tw/news/acs/201310060010.aspx>

3. Pada 11 Februari 2014, di Tiongkok Timur tepatnya di kota Nanjing, Perwakilan Taiwan dan Tiongkok mengadakan pembicaraan resmi pertama mereka sejak berakhirnya perang saudara China tahun 1949, yang melibatkan pejabat tinggi hubungan antarselat dari kedua negara yakni, Wang Yu Chi dan Zhang Zhijun. Sebuah pertemuan yang diharapkan menghasilkan beberapa hasil nyata tetapi satu yang merupakan perkembangan simbolis dalam pelonggaran terhadap persaingan lama kedua belah pihak yakni, Tiongkok menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya yang akhirnya harus dipersatukan kembali. Ini telah bereaksi dengan amarah di masa lalu terhadap langkah-langkah yang terlihat seperti memindahkan pulau yang diperintah secara mandiri menuju kemerdekaan formal. Sejak pemilihan presiden Ma Ying Jeou pada tahun 2008, yakni presiden yang mendukung agar hubungan lebih dekat dengan Tiongkok, Beijing telah mengambil pendekatan yang lebih damai. Pada tahun 2013, perdagangan lintas selat hampir dua kali lipat selama masa kepresidenan Ma, mencapai 197 miliar dollar. Pada tahun 2013, hampir tiga juta orang Tiongkok melakukan perjalanan ke Taiwan sekaligus merupakan kelompok pengunjung terbesar,

hal tersebut terjadi karena sejak tahun 2008 pasca terjadinya pelanggaran pembatasan kedatangan Taiwan ke Tiongkok.⁶⁰

Meskipun pembicaraan hanya berlangsung selama dua jam, kedua pihak sudah melakukan terobosan besar dalam hubungan antara Tiongkok dan Taiwan sejak 1949 dan pertemuan formal pertama antara kedua pihak. Dalam dua dekade terakhir, hanya dialog resmi semu yang telah dibuat antara kedua sisi selat tersebut. Lintas Selat telah saling bernegosiasi sebagai dua kepala organisasi resmi semu. Dua pejabat menteri saling menyebut gelar resmi, yang tampaknya menandai pernyataan Ma Ying Jeou tentang hubungan hukum antara kedua sisi selat bahwa, kedaulatan tidak saling mengenal, dan menduduki kekuasaan untuk tidak saling menyangkal.⁶¹

4. Pada tahun 2015, terjadi pertemuan Ma dan Xi di Singapura, Xi dan Ma bertemu dan berjabat tangan di Singapura, menandai pertemuan pertama antara para pemimpin kedua belah pihak sejak berakhirnya Perang Saudara pada tahun 1949. Mereka bertemu dalam kapasitas mereka masing-masing sebagai

⁶⁰ "Taiwan Profile." British Broadcasting Corporation. diakses pada 5 April 2019 pukul 20:22 <https://www.bbc.com/news/world-asia-16178545>

⁶¹ Zhang, Dongyang. "不加引号的台湾部长". New York Times. 2014. diakses pada 5 April 2019 pukul 23:16. <https://cn.nytimes.com/china/20140213/cc13taiwan>

pemimpin Tiongkok dan pemimpin Taiwan.⁶² Pada 30 Desember 2015, hotline yang menghubungkan kepala *China Affairs Council* dan kepala *Taiwan Affairs Office* didirikan. Percakapan pertama melalui hotline antara kedua kepala dilakukan pada 5 Februari 2016.⁶³

5. Pada bulan Maret tahun 2016, mantan *Taiwan Justice Minister*, Luo Ying Shay memulai kunjungan bersejarah 5 hari ke Tiongkok, menjadikannya Menteri pertama pemerintah Republik Taiwan yang mengunjungi Tiongkok setelah berakhirnya Perang Sipil Tiongkok pada tahun 1949.⁶⁴

C. *Contract Negotiator of Implementation*

Kegiatan *government objectives* yang ketiga, sesuai dengan konsep diplomasi komersial Evan Potter, *contract negotiator of implementation* yakni negosiasi bisnis terhadap pemerintah atau perusahaan dari *host country*. Hal ini sangat penting dalam diplomasi komersial yang menyangkut hubungan pebisnis dan pemerintah antara *host country* dengan

⁶² Lee, Shu Hua. "President Ma to meet China's Xi in Singapore Saturday." Focus Taiwan News Channel. 2015. diakses pada 31 Maret 2019 pukul 22:09. <http://focustaiwan.tw/news/afav/201511040001.aspx>

⁶³ Staff Writer. "China Picks Up Hotline Call." Taipei Times. 2016. diakses pada 31 Maret 2019 pukul 22:12. <http://www.taipetimes.com/News/taiwan/archives/2016/02/06/2003638953>

⁶⁴ Hsiang, Cheng Chen. "Minister of Justice Heads to China on Historic Visit. Taipei Times. 2016. diakses pada 31 Maret 2019 pukul 22:17. <http://www.taipetimes.com/News/front/archives/2016/03/29/2003642679>

home country. Dalam penelitian ini, menyajikan hasil negosiasi antara pemerintah Tiongkok dengan pemerintah Taiwan, pemerintah Tiongkok dengan investor Taiwan, dan pemerintah Taiwan dengan investor Tiongkok. Peneliti menemukan upaya pemerintah Tiongkok dalam merealisasikan ECFA. Sebagai usaha negosiasi bisnis yang sesuai dengan konsep diplomasi komersial Evan Potter, kedua pihak membentuk dua perjanjian tindak lanjut dibawah ECFA sebagai berikut:

1. *Cross Strait Bilateral Investment Protection and Promotion Agreement* Tahun 2012

Pada 9 Agustus 2012, telah didirikan *Cross Strait Bilateral Investment Protection and Promotion Agreement* sebagai tujuan untuk melindungi hak dan kepentingan investor di seluruh Selat Taiwan, mempromosikan investasi bersama, menciptakan lingkungan investasi yang tidak memihak, dan meningkatkan kemakmuran ekonomi lintas selat, sesuai dengan ECFA. *Straits Exchange Foundation and Association for Relations* mencapai kesepakatan yang disebut *Cross Strait Bilateral Investment Protection and Promotion Agreement*. Dalam perjanjian ini investasi adalah setiap jenis aset yang diinvestasikan oleh investor dari kedua pihak harus sesuai

laba. Serta karakteristik suatu investasi tidak akan terpengaruh jika terdapat asumsi terhadap risiko perubahan bentuk modal investasi yang dilakukan sesuai dengan hukum dan regulasi tempat investasi dilakukan.

Pada ruang lingkup praktik dan pengecualian, perjanjian ini berlaku untuk tindakan yang diadopsi dari investasi mereka yang dikelola oleh suatu pihak menuju investor pihak lain. Perjanjian ini berlaku untuk investasi yang dilakukan oleh investor dari kedua pihak sebelum atau setelah perjanjian ini mulai berlaku, tetapi tidak berlaku untuk sengketa investasi, sebagaimana didefinisikan dalam perjanjian yang telah diselesaikan sebelum perjanjian ini mulai berlaku. Perjanjian ini berlaku untuk tindakan yang diadopsi atau dikelola oleh otoritas dari semua tingkatan dari salah satu pihak dan oleh institusi yang diotorisasi oleh pihak tersebut. Suatu pihak dapat mengadopsi, memelihara, atau menegakkan tindakan apa pun yang dianggap perlu untuk melindungi kepentingan keamanan esensial. Suatu pihak dapat mengadopsi atau mempertahankan tindakan pembatasan pada investasi berdasarkan prinsip non sewenang-wenang dan tidak dapat dibenarkan adanya diskriminasi, dan

pasar Tiongkok dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi Taiwan. Perjanjian ini dibagi menjadi tiga bagian yakni, teks, *the Schedules of Specific Commitments on Trade in Services*, dan *the Specific Provisions of Service Suppliers*. Teks tersebut menuliskan penetapan aturan tentang hal-hal yang mempengaruhi perdagangan jasa dan berbagai kewajiban yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Hal-hal yang mempengaruhi perdagangan jasa seperti persyaratan transparansi, pengaturan tindakan administrasi, pencegahan persaingan tidak sehat, mekanisme negosiasi darurat, pergerakan bebas pembayaran dan transfer modal, asas adil dan perlakuan yang adil dan topik penting lainnya yang prihatin dengan pemasok layanan bagi Taiwan. Kedua pihak menegosiasikan sejumlah besar sektor jasa, termasuk layanan bisnis; layanan komunikasi; konstruksi dan jasa teknik terkait; layanan distribusi; pelayanan lingkungan; layanan yang berhubungan dengan kesehatan dan sosial; pariwisata dan layanan terkait perjalanan; layanan rekreasi, budaya, dan olahraga; jasa transportasi; dan jasa keuangan. Kedua pihak membuat komitmen untuk menghilangkan atau mengurangi batasan partisipasi ekuitas, memperluas ruang lingkup bisnis di

Tiongkok berdasarkan ketentuan geografi atau lini bisnis, dan melakukan fasilitasi tindakan perdagangan.⁷⁰

CSSTA menawarkan layanan pemudah akses kedua pihak yang lebih baik ke layanan pasar masing-masing. Kedua pihak juga akan meningkatkan transparansi aturan perdagangan dalam layanan serta bantuan penyedia layanan dari kedua belah pihak untuk melakukan bisnis. Selain itu, CSSTA menandai langkah-langkah utama bagi Taiwan untuk bergabung dengan integrasi ekonomi regional dan menandatangani perjanjian dagang dengan mitra dagang. Dalam perjanjian ini, kedua pihak telah memperluas cakupan area yang terbuka untuk investasi Tiongkok, termasuk konsultasi manajemen, iklan, layanan riset pasar, pengujian dan analisis teknis, jasa konsultasi terkait dengan sains dan teknologi, pengemasan, pencetakan, layanan pameran, pengeditan milis, telekomunikasi, pertanahan pengangkutan jasa kurir, kuota impor film, jasa konstruksi, layanan lingkungan, layanan rumah sakit, layanan sosial, agen perjalanan layanan, pengoperasian teater dan fasilitas olahraga, penjualan dan pemasaran layanan transportasi udara, layanan penyimpanan dan pergudangan, transportasi barang layanan

⁷⁰ “Ministry of Economic Affairs Taiwan”. diakses pada 5 April 2019 pukul 15:22. www.ecfa.org.tw/Download.aspx?No=34&strT=ECFADoc

Selain dua perjanjian diatas yang termasuk perjanjian tindak lanjut dari ECFA, peneliti menemukan kebijakan insentif ekonomi sebagai upaya pemerintah Tiongkok dalam realisasi ECFA yang sesuai dengan konsep diplomasi komersial Evan Potter. Kebijakan insentif ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah Tiongkok membuat hubungan ekonomi antara Tiongkok dan Taiwan menjadi semakin erat. Tiongkok menjadi tempat favorit bagi kalangan industri dan pengusaha Taiwan untuk menanamkan modalnya. Tercatat sebanyak 70% dari seluruh arus penanaman modal asing yang dilakukan oleh investor Taiwan memilih Tiongkok sebagai tempat tujuan untuk menanamkan modalnya. Terdapat lebih dari 70.000 perusahaan milik investor asal Taiwan yang beroperasi di Tiongkok.⁷³ Ada beberapa kebijakan insentif ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah Tiongkok antara lain:⁷⁴

1. Pemberian jaminan keamanan dan perlindungan penuh terhadap modal asing yang ditanam oleh investor asal Taiwan di Tiongkok. Pemerintah Tiongkok menyatakan bahwa berbagai peraturan dan regulasi telah dibuat untuk memberi jaminan keamanan dan

⁷³ Gareth, Banning. "Taiwan In Search of a Strategic Consensus." Atlantic Council. 2006. Diakses pada 30 Maret 2019 pukul 22:12.
<https://www.atlanticcouncil.org/publications/issue-briefs/taiwan-in-search-of-a-strategic-consensus>

⁷⁴ "Taiwan Affairs Office." diakses pada 31 Maret 2019 pukul 23:58.
http://www.gwytb.gov.cn/en/CrossstraitTrade/201103/t20110316_1788922.htm

perlindungan bagi modal yang ditanam oleh investor asal Taiwan di Tiongkok.

2. Pemberian fasilitas *preferential treatment* bagi investor asal Taiwan untuk menarik minat kalangan industri dan pengusaha Taiwan agar menanamkan modalnya di Tiongkok. Fasilitas *preferential treatment* yang diberikan oleh pemerintah Tiongkok seperti insentif pajak berupa *corporate income tax rate* yang rendah. Insentif pajak lainnya seperti *tax holiday* diberikan oleh pemerintah Tiongkok agar investor asal Taiwan tertarik menanamkan modalnya di Tiongkok.
3. Penyediaan dana pinjaman bagi investor asal Taiwan. Pejabat Tiongkok, Yang Yi, menyatakan bahwa Bank Pembangunan Tiongkok dan Bank Huaxia telah mengucurkan dana sebesar 8 miliar yuan atau sekitar 1 miliar US dollar khusus bagi investor asal Taiwan yang mengajukan pinjaman dana finansial.
4. Menawarkan lahan dengan harga sewa yang rendah kepada investor asal Taiwan yang ingin mendirikan perusahaan di Tiongkok.
5. Memberikan fasilitas *preferential treatment* bagi produk pertanian Taiwan yang efektif berlaku sejak bulan Agustus tahun 2005. Beberapa produk pertanian Taiwan yang menikmati fasilitas *preferential treatment* dari pemerintah Tiongkok sebagian besar adalah jenis buah-buahan seperti mangga, nanas, jeruk, jambu biji, dan belimbing. Kebijakan *preferential treatment* yang diberikan oleh

pemerintah Tiongkok terhadap produk pertanian Taiwan seperti pembebasan hambatan tarif dan pajak impor.

Peneliti juga menemukan salah satu upaya pemerintah Tiongkok merealisasikan ECFA sebagai usaha negosiasi bisnis yang sesuai dengan konsep diplomasi komersial Potter. Pada 1 Mei 2009, hubungan keuangan antara kedua bidang membaik dalam suatu langkah dalam regulator keuangan Taiwan mengumumkan bahwa, investor Tiongkok akan diizinkan untuk berinvestasi di pasar uang Taiwan untuk pertama kalinya sejak 1949. Investor sekarang dapat mengajukan permohonan untuk membeli saham Taiwan yang tidak melebihi sepersepuluh dari nilai total saham perusahaan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian peringanan dari pembatasan investasi Tiongkok. Ekonom Taipei Liang Chi Yuan, memberi komentar bahwa, faktor risiko Taiwan sebagai titik nyala telah menurun secara signifikan dengan hubungan yang membaik dengan Tiongkok. Orang Tiongkok akan ragu-ragu meluncurkan perang karena investasi mereka meningkat di sini. Perusahaan telekomunikasi terbesar Tiongkok, *China Mobile* adalah perusahaan pertama yang memanfaatkan gerakan baru ini dengan membelanjakan 529 juta dollar untuk membeli 12 persen *Far Eastone* yakni operator telekomunikasi terbesar ketiga di Taiwan.⁷⁵

⁷⁵ Jane, Macartney. "Taiwan opens up to mainland Chinese investors." *The Times*. London. 2009. diakses pada 29 Maret 2019 pukul 14:55.

4. Mempromosikan lalu lintas jalur pelayaran dan pengembangan pengiriman penumpang dan kargo melintasi Selat Taiwan;
5. Memperluas peluang kerja bagi orang Taiwan di Tiongkok, termasuk membuka ujian sertifikasi 10 profesi untuk penduduk Taiwan dan memberikan dukungan kepada orang Taiwan yang ingin memulai bisnis di Tiongkok setelah mendapatkan gelar. 10 profesi termasuk komunikasi, penerbitan, konsultasi manajemen, pembuatan prosthetics, evaluasi tahan gempa untuk bangunan, pengawas peralatan, insinyur metrologi bersertifikat;
6. Evaluasi dari 13 kota lain termasuk Shenyang, Zhengzhou, Wuhan yang akan diizinkan untuk melakukan perjalanan ke Taiwan karena turis independen dan jumlah agen perjalanan yang diizinkan untuk mengatur wisata kelompok ke Taiwan juga akan meningkat;
7. Mahkamah Agung Rakyat Tiongkok akan mengeluarkan penjelasan yang memungkinkan pengakuan dan penegakan penyelesaian sipil yang dicapai oleh komite mediasi dari kota-kota lokal Taiwan, untuk melindungi hak-hak rakyat dengan lebih baik;
8. Meningkatkan jumlah pangkalan yang ditunjuk untuk pertukaran resmi lintas selat dari 17 menjadi 28, dengan yang

bisnis kedua pihak. Taiwan harus bekerja sama dengan Tiongkok untuk meningkatkan resolusi hubungan bilateral. Selama pemerintahan Ma, Tiongkok dan Taiwan tumbuh lebih dekat melalui banyak kebijakan ekonomi. Hubungan antara Taiwan dan Tiongkok dapat ditingkatkan melalui negosiasi dan mediasi karena alternatif penyelesaian sengketa tersebut metode dapat mengarah pada hasil yang memuaskan untuk kedua negara.

Sebagai upaya dalam *problem solving*, Dewan Negara Tiongkok menerbitkan keputusan tentang mereformasi sistem manajemen investasi yang menyatakan penghentian persetujuan sistem. Tujuan keputusan ini untuk mengimplementasikan sistem otorisasi dan sistem rekaman, serta prosedur yang ketat dan rumit seperti memeriksa dan memverifikasi mulai ditinggalkan, bertujuan memberi lebih banyak kebebasan terhadap perusahaan dalam investasi pengambilan keputusan. Fungsi pemerintahan menjadi lebih berkonsentrasi pada melayani, mengawasi, dan mengatur. Peneliti juga menemukan upaya lainnya yang termasuk dalam resolving problem ini. MOFCOM, Kementerian Luar Negeri (MFA), serta Komisi Pengawasan Aset dan Administrasi Negara (SASAC) bersama-sama menerbitkan Surat Edaran untuk mengatur investasi luar negeri dan kerja sama perusahaan-perusahaan Tiongkok. Hal tersebut dikarenakan terjadinya peningkatan konflik tenaga kerja dan bisnis, masalah proyek

2014, perwakilan Tiongkok dan Taiwan hanya bertemu melalui organisasi tidak resmi atau melalui pensiunan pejabat, karena Beijing menghindari dan telah menentang segala langkah yang mungkin dianggap mengakui kedaulatan Taiwan. Pertemuan bersejarah di kota Nanjing ini merupakan pembicaraan yang difokuskan pada cara-cara untuk meningkatkan dan memformalkan komunikasi antara kedua belah pihak, serta perdagangan dan partisipasi Taiwan dalam perjanjian ekonomi regional. Dalam pembicaraan juga mengangkat masalah kunjungan konsuler ke Taiwan yang ditahan di Tiongkok, asuransi kesehatan bagi siswa Taiwan yang belajar di Tiongkok dan perlakuan adil terhadap wartawan Taiwan yang bekerja di Tiongkok.⁷⁹

Peneliti juga menemukan upaya *problem solving* pemerintah Tiongkok dalam realisasi ECFA. Pemerintah Tiongkok menyelenggarakan One Day Open Session pada tahun 2014. Pada kesempatan ini, pihak pebisnis dari kedua pihak diberi kesempatan untuk melakukan penyajian laporan tentang aktifitas bisnis, perencanaan bisnis, dan pemberdayaan pegawai. Diakhir kesempatan ini, akan disusun kesimpulan dengan penilaian kesepakatan dan akan dikirim ke badan resmi masing-masing

⁷⁹ Alexander, Yuan. "China and Taiwan Hold First Direct Talks Since '49". Associated Press. The New York Times. diakses pada 28 Juni 2019 pukul 14:06
<https://www.nytimes.com/2014/02/12/world/asia/china-and-taiwan-hold-first-official-talks-since-civil-war.html>

maupun ekonomi. Dalam segi visi misi, Kebijakan Satu China sebagai alat untuk menjaga stabilitas hubungan lintas Selat dalam politik maupun ekonomi, dan sama dengan ECFA sebagai alat untuk mempromosikan normalisasi ekonomi lintas selat hubungan dagang antara kedua negara. Dari segi implementasi, sebagai wujud Kebijakan Satu China, pemerintah Tiongkok telah berusaha keras untuk menyatukan kembali China secara damai dengan mengadakan pertukaran ekonomi dan budaya serta kontak orang ke orang antara kedua sisi Selat Taiwan telah membuat kemajuan pesat sejak akhir 1987, sementara itu ECFA juga memiliki kesamaan dalam tujuan bersatunya Taiwan dan Tiongkok dengan penandatanganan pakta penting perdagangan bebas yang dipandang sebagai perjanjian paling signifikan dalam 60 tahun pemisahan. Dari penyajian data pada bab II diatas adalah jawaban dari rumusan masalah pertama bahwa, ECFA merupakan wujud nyata dari Kebijakan Satu China.

Penyajian data pada bab III, dapat disimpulkan bahwa, pemerintah Tiongkok merealisasikan ECFA melalui kerangka diplomasi komersial Potter, yakni terdapat 5 upaya dari pemerintah Tiongkok yang sesuai dengan *Value Chain of Diplomacy Commercial*. Yang pertama yakni, *Intelligence* berupa informasi 5 bidang kebutuhan Taiwan yang dijadikan keutamaan dan pemerintah Taiwan ingin membantu pelaku bisnisnya mengembangkan industri di luar Taiwan. Yang kedua, *networking and public relations* berupa upaya kerjasama ekonomi yang tercantum dalam ECFA bagian 3 pasal 6, dalam segi upaya tindak lanjut dalam hubungan pengembangan relasi bisnis tercatat 5 pertemuan antara Tiongkok dan Taiwan.

Yang ketiga, *contract negotiator of implementation* berupa upaya negosiasi bisnis yang menghasilkan beberapa kebijakan insentif ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah Tiongkok, sekaligus memenuhi 5 bidang kebutuhan Taiwan. Yang keempat, *problem solving* berupa upaya penyelesaian masalah dalam bisnis yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok, seperti MOFCOM, Kementerian Luar Negeri (MFA), serta Komisi Pengawasan Aset dan Administrasi Negara (SASAC) bersama-sama menerbitkan Surat Edaran untuk mengatur investasi luar negeri dan kerja sama perusahaan-perusahaan Tiongkok. Hal tersebut dikarenakan terjadinya peningkatan konflik tenaga kerja dan bisnis, masalah proyek perlindungan kualitas lingkungan. Perusahaan yang melanggar hukum dan peraturan sehingga menyebabkan masalah serius di negara penerima akan dihukum oleh instansi pemerintahan tersebut. Upaya tersebut digunakan oleh Tiongkok dengan tujuan agar hubungan Tiongkok dan Taiwan berjalan harmonis, sehingga tujuan utama dari Kebijakan Satu China dapat tercapai.

Dari hasil upaya yang dilakukan oleh Tiongkok sebagai realisasi ECFA yang merupakan bagian dari realisasi Kebijakan Satu China, yaitu dengan berusaha memenuhi kebutuhan Taiwan. Upaya Tiongkok memang telah sedikit banyak berpengaruh terhadap Taiwan, namun upaya tersebut setidaknya telah menciptakan adanya kelebihan dalam hal ketergantungan Taiwan terhadap Tiongkok.

- Qing. “台湾投资者：如何在大陆保护你的投资 :简析 (海峡两岸投资保护和促进协议)”. Zhong Lun Law Firm. diakses pada 5 April 2019 pukul 11:12.
<http://www.zhonglun.com/UpFile/File/201308061453071610.pdf>
- Min Hua, Chiang. “The Controversial Cross Straits Service Trade Agreement”. EAI Background Brief No. 919. 2014. Diakses pada 4 April 21:34.
<http://www.eai.nus.edu.sg/publications/files/BB919.pdf>
- Macartney, Jane. “Taiwan opens up to mainland Chinese investors.” The Times. London. 2009. diakses pada 29 Maret 2019 pukul 14:55.
<https://web.archive.org/web/20090508083450/http://business.timesonline.co.uk/tol/business/economics/article6199775.ec>
- Banning, Gareth. “Taiwan In Search of a Strategic Consensus.” Atlantic Council. 2006. Diakses pada 30 Maret 2019 pukul 22:12.
<https://www.atlanticcouncil.org/publications/issue-briefs/taiwan-in-search-of-a-strategic-consensus>
- Cheng Lin, Hsien. “Taiwan First, Economics First, and Taiwan’s Economy First- The Open Tourism Market in Mainland China and the Development of the Medical Tourism Industry in Taiwan”. Foo Yin University Taiwan. Journal of Business & Economic Studies. diakses pada 9 April 2019 pukul 13:04.
https://www.researchgate.net/publication/315721096_Taiwan_First_Economics_First_and_Taiwan's_Economy_FirstThe_Open_Tourism_Market_in_Mainland_China_and_the_Development_of_the_Medical_Tourism_Industry_in_Taiwan
- Hong Zhao. “Taiwan Mainland Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA): Implication for Cross Straits Relations.” EAI Background Brief No.452. 2009. Diakses pada 7 Juli 2019. pukul 01:19.
<http://www.eai.nus.edu.sg/publications/files/BB452.pdf>
- Reus Diaz. “Beijing and Taiwan Work Close to Bring More Opportunities to China”. Diakses pada 25 Mei 2019 pukul 20:12. <http://diazreus.com/beijing-and-taiwan-work-closer-to-bring-more-opportunities-to-china/>
- Wenbin Huang. “Analysis of China’s Overseas Investment Policies.” Center For International Forestry Research: Bogor Barat. 2011. Diakses pada 27 Juni 2019 pukul 15:44. https://www.cifor.org/publications/pdf_files/WPapers/WP-79CIFOR.pdf

- “Trading Economics.” Taiwan Exports. diakses pada 2 Oktober 2018 pukul 12:15, <http://www.tradingeconomics.com/taiwan/exports>
- Xinhuanet.com, “Mainland, Taiwan organizations hold first talks in 9 years, diakses pada 6 Maret 2019 pukul 23:15, <http://www.xinhuanet.com/mainland-taiwan-organizations-hold/>
- “Taiwan Profile.” British Broadcasting Corporation. diakses pada 5 April 2019 pukul 20:22 <https://www.bbc.com/news/world-asia-16178545>
- Dongyang, Zhang. “不加引号的台湾部长”. New York Times. 2014. diakses pada 5 April 2019 pukul 23:16. <https://cn.nytimes.com/china/20140213/cc13taiwan/>
- Yuan, Alexander. “China and Taiwan Hold First Direct Talks Since ‘49”. Associated Press. The New York Times. diakses pada 5 April 2019 pukul 21:12 <https://www.nytimes.com/2014/02/12/world/asia/china-and-taiwan-hold-first-official-talks-since-civil-war.html>
- Ide, Bill. “China, Taiwan to Hold Historic Talks.” Voice of America. 2015. diakses pada 6 April 2019 pukul 12:11 <https://www.voanews.com/a/china-taiwan-to-hold-historic-talks-as-elections-near/3036122.html>
- Min Kok, Lee. “China and Taiwan to Hold Historic Talks in Singapore: 6 Things About Cross-Strait Relations”. The Straits Times. 2015. diakses pada 4 April 2019 pukul 23:38. <https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/china-and-taiwan-to-hold-historic-talks-in-singapore-6-things-about-cross-strait>
- Banville, Sean. “China and Taiwan in Historic Meeting”. Breaking News English. 2015. Diakses pada 4 April 2019 pukul 00:38. <https://breakingnewsenglish.com/1511/151107-china-taiwan.html>
- Chi Kuan, Huang. “China unveils 31 measures to promote exchanges with Taiwan.” Focus Taiwan News Channel. 2013. diakses pada 31/03/2019 pukul 21:16, <http://focustaiwan.tw/news/aall/201306160027.aspx>
- Chou, Jay. “Taiwan, Chinese ministers meet in groundbreaking first.” Focus Taiwan News Channel. 2013, diakses pada 29 Maret 2019 pukul 12:23. <http://focustaiwan.tw/news/acs/201310060010.aspx>
- Wang, Chris. “MAC Minister Wang in Historic Meeting.” Taipei Times. 2014. diakses pada 31 Maret 2019 pukul 21:50. <http://www.taipetimes.com/News/front/archives/2014/02/12/2003583307/1>

